

undangan bagi setiap warga negara penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pelayanan publik.

Meninjau dari Undang-Undang No 25 Tahun 2009 yaitu tentang pelayanan publik maka dibentuk Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ya

Undang-Undang itu disebutkan yaitu tentang berbagai pendapatan daerah, misalnya melalui pajak kendaraan, pajak hotel, ataupun pajak hiburan. Adapun Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Karena dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan secara rinci maka dibentuknya Peraturan Presiden No 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Peraturan Presiden ini hanya membahas tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), di dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan secara rinci baik dalam hal registrasi, prosedur pelayanan, dan lain-lain.

Menurut pandangan Dwiyanto pelayanan publik adalah instrument atau alat yang sangat penting dalam mewujudkan good governance. Purwanto mengatakan bahwa beberapa tahun yang akan datang, akan menjadi tantangan yaitu bagaimana pelayanan publik kepada warga negara dijadikan untuk tempat interaksi yang dinamis antara pemerintah